

Di antara persyaratan sebagai ahli waris ialah harus jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah jelas pula kematiannya. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah terjadinya kesulitan ketika menentukan kejelasan status ahli waris dan atau pewaris yang disebabkan hilang dalam suatu peristiwa, sehingga tidak diketahui tentang hidup ataupun kematiannya atau disebut dengan "*mafqud*". Sehingga mengakibatkan ketidakpastian terhadap kewarisannya. Menurut Pasal 171 huruf b serta Pasal 96 KHI, untuk memperoleh kepastian status *mafqud* harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan *mafqud* mendapat kejelasan. Namun permasalahan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi yuridis apabila ahli waris dan pewaris tersebut kembali, pasca diputus *mafqud*.

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada data primer. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai konsekuensi yuridis bagi pewaris terhadap ahli waris yang diputus *mafqud*; konsekuensi yuridis bagi ahli waris terhadap pewaris yang diputus *mafqud*; dan konsekuensi yuridis bagi pewaris dan ahli waris yang kembali, pasca diputus *mafqud* terhadapnya.

Kesimpulan yang diperoleh dalam Tesis ini antara lain: 1) Konsekuensi yuridis bagi pewaris terhadap ahli waris yang diputus *mafqud*, yaitu apabila ahli waris ditetapkan meninggal sebelum pewaris meninggal, berdasarkan Pasal 185 KHI, kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sesuai dengan besarnya bagian ahli waris yang digantikan. Apabila ahli waris belum dewasa, maka diampu oleh wali yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun penggantian kedudukan tersebut tidak berlaku bagi ahli waris yang terhalang mewarisi seperti yang termuat dalam Pasal 173 KHI. 2) Konsekuensi yuridis terhadap ahli waris terhadap pewaris *mafqud* yaitu untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris, maka ahli waris mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris di Pengadilan Agama, ahli waris berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pewaris sesuai ketentuan dalam Pasal 175 (1) KHI. Apabila pewaris meninggalkan pasangan (suami atau istri), maka menurut Pasal 96 KHI, bahwa setelah adanya ketetapan Pengadilan Agama yang menetapkan pewaris *mafqud*, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 3) Konsekuensi terhadap ahli waris dan pewaris yang kembali, pasca diputus *mafqud* adalah kehadiran mereka tidak menggugurkan putusan tersebut. Namun *mafqud* yang dirugikan dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum; perlawanan terhadap permohonan apabila proses permohonan masih berlangsung, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Agama, mengajukan permohonan pembatalan dan upaya hukum Luar biasa Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Ahli Waris, Pewaris, *Mafqud*, Konsekuensi yuridis.

ABSTRACT
CONSEQUENCES JURIDICAL TO
HEIRS AND DISCONNECTED HEIR MAFQUD

Among the requirements to be a clear heir is alive at the time of death of the testator and the heir among the requirements is also clear death. However, the problem then is the difficulty when determining the clarity of the status of the heir and the heir caused or lost in an event, so it is not known about the life or death, or so-called "mafqud". Resulting in uncertainty about inheritance. According to Article 171 paragraph b and Article 96 KHI, to obtain certainty mafqud status should be determined by the Religious Courts. So that everything associated with mafqud get clarity. But the problem in this case appears as a juridical consequences if the heir and the heir to the back, after mafqud disconnected.

This thesis using empirical juridical greater emphasis on primary data. Data were analyzed using descriptive analytical method. The problems discussed in this thesis is about the juridical consequences for the heir to the heir mafqud disconnected; juridical consequences for the heir to the heir to the disconnected mafqud; and the juridical consequences for the heir and the heir back, after disconnected mafqud against him.

The conclusion in this thesis are: 1) the juridical consequences of the heir heir mafqud disconnected, ie when the heir dies before the testator died defined, under Article 185 KHI, his position as heir can be replaced by his son. Share received by the heirs in accordance with the magnitude of replacement parts replaced heirs. If the heirs are minors, it is taught by a guardian assigned by the court. However, the replacement of these positions does not apply to heirs who inherit hindered as contained in Article 173 KHI. 2) the juridical consequences of the heir to the heir mafqud namely to exercise their rights and obligations as heirs, the heirs filed a request for determination as heir in the Religious, the heirs are obliged to carry out matters relating to the heir accordance with the provisions of Article 175 (1) KHI. If the testator left a spouse (husband or wife), then according to Article 96 of KHI, that after the Islamic Court which establishes provisions mafqud heir, then half of the joint property is rightfully couples live longer. 3) The consequences of the heir and the heir to the back, the post is terminated mafqud their presence does not invalidate the decision. However mafqud aggrieved by the determination may file legal effort; resistance to the request if the application process is still ongoing, filed a lawsuit in the Religious, apply for annulment and legal efforts Outstanding Reconsideration in the Supreme Court.

Keywords: Heir, the Heir, mafqud, juridical consequences.

DAFTAR ISI